

## DETERMINAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI INDONESIA

Desty Wana<sup>1</sup>, Suci Juniartika<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup> Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Pontianak  
email: [destywana@gmail.com](mailto:destywana@gmail.com)

<sup>2</sup> Jurusan Akuntansi, Universitas Tanjungpura  
email : [sucijuniartika@gmail.com](mailto:sucijuniartika@gmail.com)

---

### *Abstract*

*Poverty is not only limited to the money people have, but also the problem of lack of access to education, health, shelter, clean water and so forth. Poverty is a global and national complex issue and is multidimensional in nature. This study aims to examine the effect of Local Revenue, General Allocation Funds, Capital Expenditures, Audit Findings, and Indonesian Democracy Index on the performance of local governments. The econometrics model with OLS multiple regression analysis approach is used to test the hypotheses. The partial test results prove that the PAD, DAU, Audit Findings and Indonesian Democracy Index significantly influence the performance of local governments in Indonesia, while capital expenditures have no influence on the performance of local governments in Indonesia. Simultaneously the PAD, DAU, Capital Expenditures, Audit Findings, and Indonesian Democracy Index have a significant influence on the performance of local governments.*

**Keywords:** *Expenditures, Audit Findings, Indonesian Democracy Index, Local Government Performance, Revenue.*

### *Abstrak*

*Kemiskinan tidak hanya sebatas uang yang dimiliki, tetapi juga masalah kurangnya akses pendidikan, kesehatan, papan, air bersih dan lain sebagainya. Kemiskinan adalah masalah global dan nasional yang kompleks dan bersifat multidimensi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Temuan Audit, dan Indeks Demokrasi Indonesia terhadap kinerja pemerintah daerah. Model ekonometrika dengan pendekatan analisis regresi berganda OLS digunakan untuk menguji hipotesis. Hasil pengujian secara parsial membuktikan bahwa PAD, DAU, Temuan Audit dan Indeks Demokrasi Indonesia berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia, sedangkan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia. Secara simultan PAD, DAU, Belanja Modal, Temuan Audit, dan Indeks Demokrasi Indonesia berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah*

**Kata Kunci:** *Belanja Modal, Temuan Audit, Indeks Demokrasi Indonesia, Kinerja Pemerintah Daerah, Penerimaan Daerah.*

---

## 1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan isu global maupun nasional yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga masih menjadi keprihatinan banyak pihak dalam hal prioritas pembangunan terutama bagi pemerintah yang harus segera dituntaskan. Program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi kemiskinan di Indonesia per Maret 2019 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 25,14 juta orang (9,41%) menurun dari 25,95 juta (9,82%) pada tahun 2018. Persentase penduduk miskin terendah pada Provinsi DKI Jakarta sebesar 3,47%, sedangkan Persentase penduduk miskin tertinggi pada Provinsi Papua sebesar 27,53%. Perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2014 – 2019 mengalami penurunan baik sisi jumlah maupun persentasenya, kecuali pada Maret 2015 terjadi peningkatan sebesar 0,26%. (Bagindo, 2019) Penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2019 lebih banyak menempati di kawasan Perdesaan sebesar 15,15 juta orang (12,85%) dibanding kawasan perkotaan sebanyak 9,99 juta orang (6,69%). Meskipun angka kemiskinan menurun, upaya pengentasan kemiskinan masih harus terus dilakukan agar Indonesia terlepas dari masalah kemiskinan.

Kemiskinan dideskripsikan tidak hanya Peranan Pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dengan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam meningkatkan pelayanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan nasional yang semakin besar, maka dari itu diperlukannya sistem pemantauan, evaluasi dan pengukuran kinerja yang sistematis untuk mengukur keberhasilan suatu pemerintahan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa Pemerintah daerah diberi hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom

dari pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap provinsi dan daerah diberi hak dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit mungkin campur tangan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam hal pelayanan kepada masyarakat dan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pemerataan pembangunan yang didukung dengan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan memudahkan daerah dalam memetakan dan mengalokasikan prioritas pembangunan daerah sehingga kinerja daerah bisa meningkat secara signifikan. (Akbar, 2015) mengemukakan bahwa Pengukuran kinerja pemerintah daerah di dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat terdiri dari beberapa indikator, yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita, tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran dan Rasio Gini. Kinerja Pemerintah daerah dapat diukur dari tingkat kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. (Nugroho, 2014) dan (Renas, 2014) menyatakan pengaruh karakteristik Pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah yang diproksikan dengan variabel IPM. (Mangkunegara, 2015) juga menyatakan bahwa pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan pada kesejahteraan masyarakat yang diproksikan dengan IPM.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* adalah indeks yang digunakan untuk menggambarkan capaian di sektor kesejahteraan masyarakat secara agregat, karena indeks ini menangkap perkembangan di sektor ekonomi dan sosial secara bersamaan. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya pembangunan kualitas hidup manusia (masyarakat). IPM memberikan suatu ukuran gabungan dari tiga indikator yaitu pendidikan, kesehatan dan income perkapita yang mana

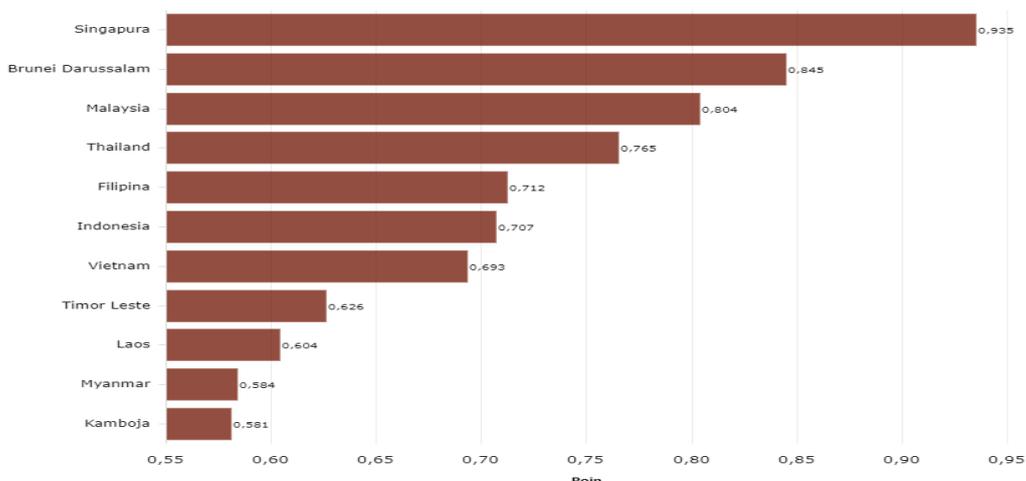
indikator ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang perlu dimiliki agar mampu meningkatkan potensinya.

Pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2019, IPM Indonesia mencapai 71,92. Angka ini meningkat sebesar 0,53 (0,74%) dibandingkan tahun 2018 dan meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi” mulai tahun 2016. Selain itu, kualitas kesehatan, pendidikan dan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Indonesia juga mengalami peningkatan (BPS, 2019). Kemajuan pembangunan manusia pada tahun 2019 juga terlihat dari perubahan status pembangunan manusia di tingkat provinsi. Jumlah provinsi yang berstatus “sedang” berkurang dari 12 provinsi pada tahun 2018 menjadi 11 provinsi pada tahun 2019. Provinsi Sumatera Selatan yang berstatus “sedang” pada tahun 2018 berubah status menjadi “tinggi” pada tahun 2019. Hingga saat ini, terdapat 22 provinsi yang berstatus pembangunan manusia “tinggi”, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Sejak tahun 2018, tidak ada provinsi yang berstatus pembangunan manusia “rendah” di Indonesia.

Hal ini karena pada tahun 2018, status pembangunan manusia di Provinsi Papua telah berada pada level “sedang”. (BPS, 2019)

Peningkatan IPM di tingkat nasional juga tercermin pada level provinsi. Selama periode 2018 hingga 2019, IPM di seluruh provinsi mengalami peningkatan. Pada periode ini, tercatat tiga provinsi dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat, yaitu Provinsi Papua Barat (1,51 persen), Provinsi Maluku Utara (1,39 persen), dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (1,30 persen). Kemajuan pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat dan Maluku Utara didorong oleh dimensi standar hidup layak, sementara di Nusa Tenggara Timur didorong oleh dimensi pendidikan. (BPS, 2019)

Selain dari peningkatan IPM pada tingkat nasional, IPM berdasarkan UNDP (2019) juga mengungkapkan bahwa Indeks Indonesia pada tahun 2018 masuk dalam kategori pembangunan tinggi dengan skor 0,707 dan berada di peringkat 6 di Asia Tenggara dan Peringkat 111 di Dunia. Hal ini dapat dilihat dari kuatnya komitmen nasional untuk membangun manusia dari segi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat. Namun hal ini masih perlu untuk mengurangi dan mengantisipasi ketimpangan di masa yang akan datang. Berikut IPM 2018, di Asia Tenggara, antara lain :



Gambar 1 Indeks Pembangunan Manusia 2018 di Asia Tenggara

Posisi yang menduduki IPM tertinggi di Asia Tenggara yaitu Singapura dengan

perolehan skor 0,925. Setelah itu, diduduki oleh Brunei Darussalam, dan Malaysia. Ketiga

negara tersebut masuk dalam kategori pembangunan sangat tinggi (*Very High Human Development*). Selain Indonesia, Thailand dan Filipina juga masuk dalam kategori pembangunan tinggi (*High Human Development*). Lalu, Vietnam, Timor Leste, Laos, Myanmar, dan Kamboja termasuk dalam kategori pembangunan menengah (*Medium Human Development*).

Pengentasan ketimpangan dalam pembangunan dapat diperkuat dengan kinerja daerah. Pengukuran kinerja daerah sebagai Percepatan perwujudan kesejahteraan masyarakat provinsi di Indonesia dengan menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia, tentunya pemerintah daerah harus dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. (Prasetyaningsih, 2015) menyatakan bahwa Pemerintah daerah memiliki kondisi yang berbeda sesuai dengan sumber daya keuangan dan penggunaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Oleh karena itu, masing – masing daerah memiliki karakteristik atau ciri khas tersendiri, walaupun penyajian laporan keuangan sesuai dengan ketentuan penyusunan laporan keuangan daerah.

Sumber daya keuangan pemerintah salah satunya pendapatan asli daerah yang seharusnya merupakan basis utama bagi daerah sehingga ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat melalui dana perimbangan semakin berkurang dan pada akhirnya daerah memiliki kekuatan dalam memenuhi segala kebutuhannya terkait prosedur pelayanan publik (Yanto & Fattah, 2004). Selain PAD, Dana Alokasi Umum (DAU) juga memiliki peranan penting dalam pembangunan karena merupakan salah satu instrumen fiskal dana perimbangan yang bertujuan untuk membiayai permasalahan terutama dalam bidang kesehatan dan infrastruktur (Ramadhani, 2019). Berdasarkan penelitian (Renas, 2014), menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah dipengaruhi oleh ukuran daerah, tingkat kekayaan, status daerah, dana perimbangan, belanja daerah, dan temuan audit. Sedangkan (Kusumawardani, 2012) menunjukkan bahwa size, kemakmuran, ukuran legislatif, leverage mempengaruhi kinerja pemerintah daerah.

Selain dari sumber daya keuangan, sektor non keuangan pun juga turut andil di dalam mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Kepercayaan masyarakat seringkali dapat dilihat dari baik atau tidaknya opini audit yang diterima dalam pemerintah daerah, semakin baik opini yang diberikan maka semakin kecil pula tingkat temuan audit yang ditemukan oleh auditor. Sektor non keuangan lainnya, yaitu Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Perkembangan nilai IDI dapat dilihat dari sisi lemah kehidupan berdemokrasi di suatu Provinsi. Hal ini, menyebabkan suatu pemerintah daerah memberikan prioritas perencanaan pembangunan khususnya dibidang politik.

Penelitian ini akan menguji determinan kinerja pemerintah daerah provinsi di Indonesia. Beberapa pertanyaan penelitian yang dikemukakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Modal, Temuan Audit, dan Indeks Demokrasi Indonesia berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia dalam mensejahterakan masyarakat. Persoalan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan menjadi isu menarik untuk dilakukan penelitian. Hal ini terus menjadi perhatian pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Penelitian ini diharapkan akan berkontribusi kepada institusi yang berwenang, yaitu pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan evaluasi program pengentasan kemiskinan, pertimbangan atas kebijakan pengalokasian APBD yang lebih tepat untuk percepatan pembangunan dalam hal penanggulangan kemiskinan.

## 2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori utama yang menjadi dasar mengenai determinan kinerja pemerintah daerah dijelaskan dengan teori *agency*. (Nugroho, 2014) menyatakan bahwa hubungan agensi sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih (prinsipal) menyewa orang lain untuk melakukan beberapa jasa

untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Prinsip *agency theory* dikemukakan oleh (Prasetyaningsih, 2015) (dalam Jensen dan Meckling, 1976) menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (principal) dengan pihak yang menerima wewenang (agensi). Hubungan antara keduanya dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi, karena informasi yang dimiliki oleh agen lebih banyak dibandingkan dengan *principal*. Eisenhardt (dalam(Wathani, 2017)) menggunakan tiga asumsi sifat dasar manusia guna menjelaskan tentang teori keagenan, yaitu : (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki keterbatasan daya pikir mengenai persepsi di masa datang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu berusaha menghindari resiko (*risk averse*).

Pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya oleh pemerintah harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Hal tersebut bertujuan agar informasi yang diperoleh masyarakat sesuai dengan yang disampaikan pemerintah. Masyarakat yang diwakili oleh lembaga legislatif harus mengawasi penggunaan APBD yang ada sesuai peruntukannya, sehingga salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah agar masyarakat percaya adalah dengan memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik (Mustikarini, 2012). Pemerintah Daerah wajib menyusun dan melaporkan realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah seperti PAD, DAU, dan Belanja Daerah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu Laporan Realisasi Anggaran. Selain itu, pemerintah juga harus mempublikasikan jumlah temuan Audit dalam bentuk daftar rekapitulasi Hasil pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada pemerintah daerah yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Serta Indeks Demokrasi Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik.

Berdasarkan teori agensi peran pemerintah didalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sangat penting sesuai dengan yang tertuang didalam Undang-Undang Dasar 1945, maka dari itu pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah diberlakukan. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dimana dari hasil pemeriksaan tersebut berupa opini audit, temuan audit serta simpulan dalam bentuk rekomendasi (Undang – Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 Tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah disusun oleh pemerintah daerah kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menguji tingkat keandalan suatu laporan keuangan. LKPD yang telah diperiksa akan menghasilkan sebuah pernyataan temuan audit yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah sebagai badan eksekutif wajib menjalankan peran dan tugas dengan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang diberlakukan, karena jika Kinerja pemerintah daerah baik maka, kesejahteraan masyarakat akan baik pula.

### **Kinerja Pemerintah Daerah**

Definisi kinerja dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Menurut *The Scribner-Bantam English Dictionary* yang dikutip oleh (Ayu & Yunita, 2016) definisi kinerja adalah sebagai berikut :

*Performance atau kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu*

*organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai moral maupun etika.*

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis untuk menilai apakah program atau kegiatan telah direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana tersebut dan yang lebih penting adalah apakah telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perencanaan (Muid, 2014). Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang (Bastian, 2006). Pengukuran kinerja berfungsi untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program, atau kegiatan. Tujuan pengukuran kinerja keuangan yaitu untuk menilai kinerja keuangan dalam hal efisiensi dan efektifitas. Menurut Bastian (2006) indikator pengukuran kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan perlu adanya penilaian kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan dan kesesuaian dengan program yang telah direncanakan. Pengukuran kinerja pemerintah daerah penting dilaksanakan sehingga dalam menjalankan peran dan fungsinya selalu mengacu pada tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Kinerja pemerintah daerah adalah penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu daerah berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya (Meilina, *e.tc*, 2016).

(Akbar, 2015), mengemukakan bahwa Pengukuran kinerja pemerintah daerah didalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat terdiri dari beberapa indikator, yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita, tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat

pengangguran dan Rasio Gini. Konteks pembangunan daerah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditetapkan sebagai salah satu ukuran utama yang dicantumkan dalam pola dasar pembangunan daerah. Hal ini menandakan bahwa IPM menduduki satu posisi penting dalam manajemen pembangunan daerah yang bertujuan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud dari kinerja pemerintah daerah yang berhasil. Fungsi IPM dan indikator pembangunan manusia lainnya akan menjadi kunci bagi terlaksannya kinerja dan pembangunan daerah yang terarah.

### **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Awal tahun 1990-an program pembangunan, UNDP mengukur kesejahteraan masyarakat secara lebih komprehensif dengan menggunakan tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan pendapatan per kapita yang dikonstruksikan menjadi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). Tujuan Negara Republik Indonesia dirumuskan dalam UUD 1945, yaitu pertama untuk dapat melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, kedua untuk memajukan kesejahteraan umum, ketiga dapat mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keempat dapat ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berkaitan dengan hal tersebut, maka didalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan UUD 1945, maka pihak yang bertanggung jawab dalam memenuhi tujuan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat tersebut adalah pemerintah yang dilaksanakan oleh menteri, dan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh gubernur untuk tingkat provinsi dan bupati/walikota untuk tingkat kabupaten/kota.

Penelitian ini yang menjadi tolak ukur dari tingkat kesejahteraan masyarakat disuatu daerah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). IPM merupakan indikator

penting dan bermanfaat untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui atas pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas yang terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, dapat menggunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan, menggabungkan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak, indikator yang digunakan adalah kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat berdasarkan rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Manfaat utama HDI adalah untuk menunjukkan bahwa suatu negara sesungguhnya dapat berkinerja jauh lebih baik sekalipun tingkat pendapatannya rendah. Sebaliknya, tingkat pendapatan yang tinggi tidak selamanya diikuti dengan capaian pembangunan manusia yang tinggi pula. HDI menunjukan bahwa perbedaan dalam pendapatan lebih besar dibandingkan dengan perbedaan dalam indikator pembangunan lainnya dalam hal pendidikan dan kesehatan (Todaro dan Stephen, 2011 : 59)

Komponen IPM diantaranya ialah usia hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent living*). Usia hidup diukur dengan angka harapan hidup atau  $e_0$  yang dihitung menggunakan metode tidak langsung (metode *Brass, varian Trussel*) berdasarkan variabel rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. Komponen pengetahuan diukur antara angka melek huruf dengan rata-rata

lama sekolah yang dihitung berdasarkan data *Susenas Kor*. Sebagai catatan, UNDP dalam publikasi tahunan HDR sejak 1995 menggunakan indikator partisipasi sekolah dasar, menengah, dan tinggi sebagai pengganti rata-rata lama sekolah karena sulitnya memperoleh data rata-rata lama sekolah secara global. Indikator angka melek huruf diperoleh dari variabel kemampuan membaca dan menulis, sedangkan indikator rata-rata lama sekolah dihitung dengan menggunakan dua variabel secara simultan yaitu tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Komponen standar hidup layak, diukur menggunakan indikator rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan. Sebagai catatan, indikator UNDP diukur dengan PDB per kapita riil yang telah disesuaikan (*adjusted real GDP per capita*) sebagai ukuran komponen tersebut karena tidak tersedia indikator lain yang lebih baik untuk keperluan perbandingan antar negara.

Indikator dasar atas tiga segi pembangunan, antara lain pendapatan riil per kapita yang disesuaikan dengan daya beli (*purchasing power*), kesehatan sebagaimana yang diukur dari tingkat harapan hidup, asupan nutrisi, dan tingkat mortalitas anak, serta pencapaian pendidikan sebagaimana yang diukur dengan tingkat melek aksara dan tingkat pendidikan atau lama belajar di sekolah. UNDP didalam laporan pembangunan manusia (*Human Development Report*) berusaha memeringkat semua negara dengan skala 0 (pembangunan manusia terendah) sampai 1 (pembangunan manusia tertinggi) berdasarkan pada tiga tujuan atau produk akhir pembangunan, yaitu masa hidup (*longevity*) yang diukur melalui harapan hidup setelah lahir, pengetahuan yang diukur dengan bobot rata-rata tingkat melek aksara orang dewasa dengan bobot dua per tiga dan rasio partisipasi sekolah bruto (*gross school enrollment ratio*) dengan bobot satu pertiga, serta standar hidup yang diukur berdasarkan produk domestik bruto per kapita yang

disesuaikan dengan paritas daya beli mata uang setiap negara yang nilainya berbeda-beda untuk mencerminkan biaya hidup dengan asumsi utilitas marginal yang semakin menurun (*diminishing marginal utility*) pendapatan (Todaro dan Smith, 2011).

IPM merupakan suatu data strategis bagi Indonesia, dimana selain memiliki fungsi sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan untuk penentuan salah satu alokator dari Dana Alokasi Umum (DAU). Pada tahun 2015, metodologi IPM mengalami perubahan karena beberapa alasan, yaitu :

- a. Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam perhitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak lagi relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. Selain itu, indikator PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
- b. Kegunaan rumus aritmatik pada perhitungan IPM menggambarkan rendahnya capaian di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

#### **Pengembangan Hipotesis**

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan atas daerah itu sendiri yang terdiri dari pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli yang sah serta diharapkan terus mengalami peningkatan, dengan hal itu dengan meningkatnya pendapatan asli daerah diharapkan pula dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Kinerja pemerintah yang baik akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian Wathani (2017), Renas (2014), dan Indrarti (2011), menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang positif antara pendapatan asli daerah dan kinerja

pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, dapat dikembangkan hipotesis antara lain :

**H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.**

Salah satu tujuan pemberian Dana Perimbangan adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah. Dana Alokasi Umum diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan penerimaan daerahnya. Penelitian yang telah dilakukan oleh Indararti (2011), Sumarjo (2010), dan Virgasari (2009) menjelaskan bahwa terdapat korelasi yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Maka dari itu, dapat dikembangkan hipotesis, antara lain:

**H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.**

Christy dan Adi (2009) menyatakan bahwa untuk meningkatkan kemajuan daerah dan mensejahterakan masyarakat daerah diperlukan pengalokasian belanja modal yang lebih besar, berupa pembenahan pembangunan dan infrastruktur yang memadai. Peningkatan infrastruktur publik dan penanaman modal pemerintah seperti pembenahan segala penunjang pendidikan, kesehatan, dan prasarana lain sehingga dapat memaksimalkan pelayanan sektor publik secara berkesinambungan (Bati, 2009). Belanja modal dialokasikan berdasarkan kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana daerah, disamping itu juga untuk mendapatkan aset tetap daerah. Penelitian yang dilakukan Setyowati dan Maiharyanti (2010), Mirza (2012), dan Sari dan Ni Luh (2016) menjelaskan bahwa belanja modal memberi dampak positif pada indeks pembangunan manusia, sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan

masyarakat. Maka dari itu, dapat dikembangkan hipotesis, antara lain :

**H3 : Belanja Modal berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.**

Temuan Audit merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan pemda atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya temuan ini menyebabkan BPK akan meminta adanya peningkatan pemeriksaan dan koreksi. Sehingga, menyebabkan semakin besarnya jumlah temuan Audit maka akan semakin rendah pula kinerja pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Liestiani (2008), Mustikarini dan Fitrihari (2012), dan Ratnasari (2016) yang menghasilkan bahwa semakin besar jumlah temuan audit pada suatu pemerintah daerah maka semakin rendah kinerja pemerintah daerah tersebut. Maka dari itu, dapat dikembangkan hipotesis, antara lain:

**H4 : Temuan Audit berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.**

Pemerintah telah memastikan perlindungan dan rasa aman, pemerintahan yang bersih, kemajuan desa, dan daerah-daerah pinggiran serta tegaknya sistem hukum yang merupakan prioritas dalam pembangunan dibidang politik. Partisipasi dalam pemilu merupakan salah satu indikator dari kualitas demokrasi. Semakin baiknya Demokrasi di Indonesia menyebabkan kualitas pemerintahan yang menerapkan prinsip dasar *good governance*. Penelitian Ballester, dkk (2010) yang melakukan analisis terhadap dampak pemilu di Fillina menjelaskan bahwa pemilu atau demokrasi berdampak positif pada sektor industri. Indeks Demokrasi merupakan variabel yang masih sangat jarang diteliti terutama di sektor pemerintahan padahal Indeks Demokrasi sangat berkaitan erat terhadap penilaian kinerja pemerintah baik

secara langsung maupun tidak langsung, yang menyebabkan dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Maka dari itu, dapat dikembangkan hipotesis, antara lain :

**H5 : Indeks Demokrasi Indonesia berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.**

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Sumber data berasal dari informasi yang tersedia secara publikasi maupun non publikasi berupa catatan atau laporan yang disampaikan kepada instansi yang berwenang, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pemeriksa keuangan (BPK). Pengumpulan data tersebut melalui laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah periode tahun 2014 – 2018. Data tersebut memuat variabel penelitian, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Modal, Temuan Audit, dan Indeks Demokrasi serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi melalui laporan, publikasi, dokumen dan laporan tertulis lainnya.

Populasi penelitian mencakup seluruh pemerintah daerah provinsi di Indonesia selama periode 2014 – 2018 sebanyak 34 provinsi. Populasi memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2017). Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria yang ditentukan berdasarkan kebijakan dari peneliti. Adapun kriteria dalam penentuan sampel seperti pemerintah daerah yang memiliki rincian penerimaan dan pengeluaran daerah sehingga dalam penelitian ini terdapat 30 provinsi pemerintah daerah dengan tahun pengamatan 5 periode.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat eksperimen dengan maksud mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain dalam kondisi tertentu melalui pengujian hipotesis. Penelitian ini

mengembangkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan menguji variabel lain yang belum pernah diteliti sesuai dengan dinamika ekonomi publik. Pengujian hipotesis melibatkan lima variabel independen yaitu PAD, DAU, Belanja Modal, Temuan Audit, dan IDI serta satu variabel dependen yaitu kinerja pemerintah daerah dengan proksi IPM.

Pengujian menggunakan model ekonometrika. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian adalah pengujian regresi linier berganda untuk pengujian hipotesis dengan bantuan *software views* 8.0. Sebelum melakukan perhitungan statistik regresi linier berganda untuk pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji statistik deskriptif yang digunakan untuk memberikan uraian atau gambaran mengenai keadaan tertentu. Selanjutnya dilakukan pengujian regresi dengan model persamaan yang dirumuskan, sebagai berikut :

$$\gamma = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 BM + \beta_4 TA + \beta_5 IDI + e$$

Keterangan :

$\gamma$  : IPM

BM : Belanja Modal

$\alpha$  : Konstanta

TA : Temuan Audit

$\beta$  : Koefisien Elastisitas

IDI : Indeks Demokrasi Indonesia

PAD :Pendapatan Asli Daerah

$e$  : error

DAU : Dana Alokasi Umum

Pengujian Uji Chow digunakan untuk menentukan apakah model masuk dalam

kategori *Common Effect* atau *Fixed effect* dalam melakukan pengolahan data panel. Dasar penentuan model tersebut dilihat dari nilai probabilitas, untuk *cross section* F, jika nilainya  $> 0,05$ , maka model yang dipilih CE, tetapi jika prob *cross section* F  $< 0,05$  maka model yang terpilih adalah FE. Setelah model telah dipilih, maka selanjutnya dilakukan pengujian terhadap asumsi klasik. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah model tersebut dapat dianggap relevan atau tidak. Pengujian yang dilakukan pada asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Selain itu, juga dilakukan pengujian secara statistika yang meliputi uji statistik t, uji statistik f, dan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ).

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Deskriptif Statistik

Penelitian ini menggunakan data agregat se-provinsi di Indonesia. Penentuan sampel dengan metode *Purposive Sampling*. hasil yang diperoleh sebanyak 30 Provinsi dengan 5 periode tahun pengamatan. Data penelitian bersumber dari data Badan Pusat Statistik masing-masing provinsi dan data non keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan berupa Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan selama periode 2014 – 2018. Jumlah observasi penelitian ini sebanyak 150 objek. Hasil sampel pemerintah daerah yang ditentukan dengan menggunakan *Purposive Sampling* sebagaimana Tabel 1.

**Tabel 1 Sampel Penelitian Tahun 2014 – 2018**

No.	Nama Pemerintah Daerah	No.	Nama Pemerintah Daerah
1.	Provinsi Aceh	16.	Provinsi Bali
2.	Provinsi Sumatera Barat	17.	Provinsi Nusa Tenggara Barat
3.	Provinsi Riau	18.	Provinsi Nusa Tenggara Timur
4.	Provinsi Jambi	19.	Provinsi Kalimantan Barat
5.	Provinsi Sumatera Selatan	20.	Provinsi Kalimantan Tengah
6.	Provinsi Bengkulu	21.	Provinsi Kalimantan Selatan
7.	Provinsi Lampung	22.	Provinsi Kalimantan Timur
8.	Provinsi Bangka Belitung	23.	Provinsi Sulawesi Utara
9.	Provinsi Kepulauan Riau	24.	Provinsi Sulawesi Tengah
10.	Provinsi DKI Jakarta	25.	Provinsi Sulawesi Tenggara

11. Provinsi Jawa Barat	26. Provinsi Gorontalo
12. Provinsi Jawa Tengah	27. Provinsi Sulawesi Barat
13. Provinsi DI. Yogyakarta	28. Provinsi Maluku Utara
14. Provinsi Jawa Timur	29. Provinsi Papua Barat
15. Provinsi Banten	30. Provinsi Papua

Sumber : Data Olahan, 2020

Analisis statistik deskriptif diperlukan untuk menyajikan gambaran mengenai data yang digunakan dalam penelitian. Data sampel yang melebihi 30 objek memungkinkan untuk

melakukan pengujian menggunakan metode parametrik. Hasil pengujian statistik memberi gambaran sebagai berikut:

**Tabel 2 pengujian statistik deskriptif**

Variabel	Obs	Min	Max	Mean	SD
PAD	150	2.03E+11	4.39E+13	4.32E+12	7.58E+12
DAU	150	0.000000	5.03E+12	1.30E+12	7.85E+11
DBM	150	6.20E+08	1.73E+13	1.52E+12	2.35E+12
TA	150	8	289	43.90667	40,94100
IDI	150	53	85,58	71.12727	6.792231
IPM	150	56,75	80,47	69.16713	4.397280

Sumber : Data Olahan, 2020

Variabel Pendapatan Asli Daerah mempunyai nilai terendah  $2.03 \times 10^{11}$  dan nilai tertinggi sebesar  $4.39 \times 10^{13}$  dengan nilai rata-rata yaitu  $4.32 \times 10^{12}$  serta tingkat standar deviasi sebesar  $7.58 \times 10^{12}$ . Apabila dibandingkan nilai standar deviasi dengan nilai rata-rata untuk variabel PAD, standar deviasi mempunyai nilai yang lebih besar dibandingkan nilai rata-ratanya. Dengan demikian, nilai mean tersebut belum tepat dijadikan representasi dari keseluruhan data.

Variabel Dana Alokasi Umum mempunyai nilai terendah 0.00000 dan nilai tertinggi sebesar  $5.03 \times 10^{12}$  dengan nilai rata-rata yaitu  $1.30 \times 10^{12}$  serta tingkat standar deviasi sebesar  $7.85 \times 10^{11}$ . Apabila dibandingkan nilai standar deviasi dengan nilai rata-rata untuk variabel DAU, standar deviasi mempunyai nilai yang lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya. Dengan demikian, nilai mean tersebut memiliki representasi yang baik terhadap keseluruhan data penelitian.

Variabel Belanja Modal mempunyai nilai terendah  $6.20 \times 10^8$  dan nilai tertinggi sebesar  $1.73 \times 10^{13}$  dengan nilai rata-rata yaitu  $1.52 \times 10^{12}$  serta tingkat standar deviasi sebesar  $2.35 \times 10^{12}$ . Apabila dibandingkan nilai

standar deviasi dengan nilai rata-rata untuk variabel BM, standar deviasi mempunyai nilai yang lebih besar dibandingkan nilai rata-ratanya. Dengan demikian, nilai mean tersebut belum tepat dijadikan representasi dari keseluruhan data.

Variabel Temuan Audit mempunyai nilai terendah 8 dan nilai tertinggi sebesar 289 dengan nilai rata-rata yaitu 43.90667 serta tingkat standar deviasi sebesar 40.4100. Apabila dibandingkan nilai standar deviasi dengan nilai rata-rata untuk variabel TA, standar deviasi mempunyai nilai yang lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya. Dengan demikian, nilai mean tersebut memiliki representasi yang baik terhadap keseluruhan data penelitian.

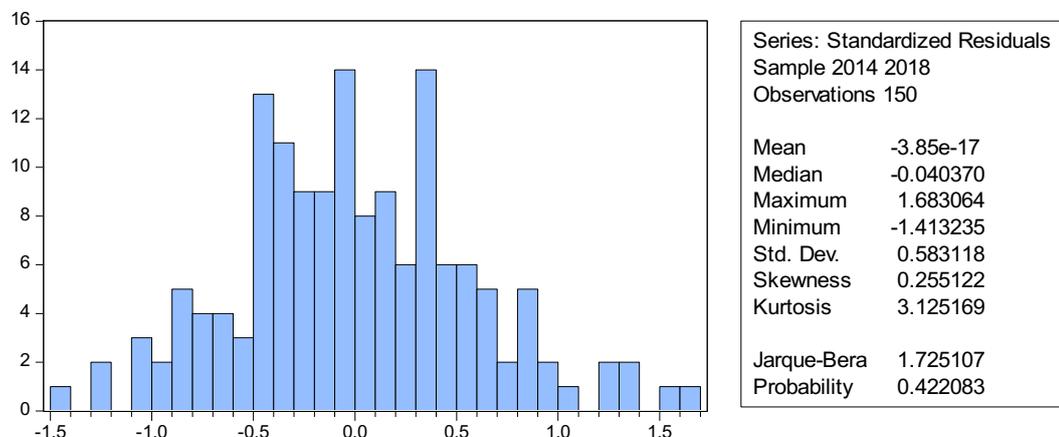
Variabel Indeks Demokrasi Indonesia mempunyai nilai terendah 53 dan nilai tertinggi sebesar 85.58 dengan nilai rata-rata yaitu 71.12727 serta tingkat standar deviasi sebesar 6.792231. Apabila dibandingkan nilai standar deviasi dengan nilai rata-rata untuk variabel IDI, standar deviasi mempunyai nilai yang lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya. Dengan demikian, nilai mean tersebut memiliki representasi yang baik terhadap keseluruhan data penelitian.

Variabel Indeks Pembangunan Manusia mempunyai nilai terendah 56.75 dan nilai tertinggi sebesar 80.47 dengan nilai rata-rata yaitu 69.16713 serta tingkat standar deviasi sebesar 4.397280. Apabila dibandingkan nilai standar deviasi dengan nilai rata-rata untuk variabel IPM, standar deviasi mempunyai nilai yang lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya. Dengan demikian, nilai rata-rata tersebut memiliki representasi yang baik terhadap keseluruhan data penelitian.

Analisis Data dan Pembahasan Penelitian menggunakan pendekatan parametrik yang bertujuan melakukan pengujian hipotesis dengan uji-t. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi OLS (*Ordinary Least Squares*). OLS melakukan

estimasi parameter yang menentukan nilai variabel independen. Sebelum melakukan analisis regresi, pengujian asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran asumsi regresi linier. Uji asumsi klasik yang dilakukan mencakup uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

Pengujian normalitas digunakan untuk mendeteksi data yang digunakan dalam penelitian berasal dari populasi terdistribusi secara normal. Data terdistribusi normal atau mendekati normal dibutuhkan untuk memenuhi syarat model regresi yang baik. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan analisis grafik *normal probability plot*. Hasil Pengujian Normalitas, sebagai berikut:



**Gambar 2 Hasil Uji Normalitas**

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa nilai *probability jarque berra* sebesar 0,422083 > 0,05 yang berarti residual data penelitian terdistribusi secara normal. Hal ini menyebabkan bahwa data tersebut dapat digunakan dalam penelitian.

Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terbebas dari adanya korelasi tinggi atau sempurna antar variabel bebas (independen).

Jika ditemukan ada hubungan korelasi yang tinggi antar variabel bebas dapat dinyatakan adanya gejala multikolinearitas. Syarat regresi yang baik adalah terbebas dari masalah multikolinearitas. Jika nilai VIF < 10, maka dapat dikatakan bebas dari masalah multikolinearitas, sedangkan jika nilai VIF > 10, maka dapat dikatakan terjadi masalah multikolinearitas. Berikut hasil pengujian multikolinearitas, sebagai berikut :

**Tabel 3 Hasil Pengujian Multikolinearitas**

Variable	Centered VIF	Keterangan
C	NA	
PAD	3.249719	Tidak Terdapat Multikolinearitas
DAU	1.271963	Tidak Terdapat Multikolinearitas
BM	2.233666	Tidak Terdapat Multikolinearitas
TA	2.950445	Tidak Terdapat Multikolinearitas
IDI	1.063482	Tidak Terdapat Multikolinearitas

Sumber : Data Olahan, 2020

Dari hasil uji multikolinearitas dapat dilihat bahwa nilai VIF < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas pada variabel penelitian tersebut. Hal ini membuktikan bahwa data tersebut dapat digunakan dalam penelitian.

Pengujian heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Adanya

ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi disebut heteroskedastisitas. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Model pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji Breusch-Pagan-Godfrey. Berikut hasil pengujian heteroskedastisitas, sebagai berikut :

**Tabel 4 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas**  
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	1.330925	Prob. F(5,144)	0.2544
Obs*R-squared	6.625708	Prob. Chi-Square(5)	0.2500
Scaled explained SS	5.497081	Prob. Chi-Square(5)	0.3583

Sumber : Data Olahan, 2020

Berdasarkan perhitungan dengan metode BPG diperoleh bahwa nilai prob chi-square sebesar  $0,2500 > 0,05$  yang artinya tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Hal ini membuktikan bahwa data tersebut dapat digunakan dalam penelitian.

Autokorelasi merupakan pengujian korelasi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Autokorelasi dapat diketahui melalui uji Durbin Watson (D-W Test) adalah pengujian

yang digunakan untuk menguji ada atau tidaknya korelasi serial dalam model regresi atau untuk mengetahui apakah di dalam model yang digunakan terdapat autokorelasi diantara variabel-variabel yang diamati. Syarat regresi yang baik, yaitu terbebas dari masalah autokorelasi. Cara mendeteksi terjadinya autokorelasi salah satunya dengan melihat angka Durbin Watson (DW) yang dibandingkan dengan nilai DW pada tabel.

**Tabel 5 Hasil Pengujian Autokorelasi**

Test Equation:			
Dependent Variable: Y			
Method: Least Squares			
Sample: 1 150			
Included observations: 150			
R-squared	0.590539	Mean dependent var	-1.04E-14

Adjusted R-squared	0.570354	S.D. dependent var	3.303762
S.E. of regression	2.165530	Akaike info criterion	4.435066
Sum squared resid	665.9120	Schwarz criterion	4.595633
Log likelihood	-324.6300	Hannan-Quinn criter.	4.500299
F-statistic	29.25671	<b>Durbin-Watson stat</b>	<b>1.901021</b>
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Durbin – Watson sebesar 1,901021. Sehingga  $du < dw < 4-du$ , maka  $1.8024 < 1.90102 < 2.1976$  dapat dikatakan bahwa model dalam penelitian ini tidak terjadi masalah autokorelasi.

Penelitian ini menguji pengaruh variabel independen yaitu PAD, DAU, Belanja Modal,

Temuan Audit, dan Indeks Demokrasi Indonesia terhadap variabel dependennya yakni Kinerja Pemda yang diprosikan IPM di Indonesia. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi OLS untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai hubungan kausalitas kedua variabel tersebut.

**Tabel 6 Hasil Pengujian Hipotesis**

Dependent Variable: Y  
 Method: Panel Least Squares  
 Sample: 2014 2018  
 Periods included: 5  
 Cross-sections included: 30  
 Total panel (balanced) observations: 150

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.	Keputusan
C	63.34791	68.70573	0.0000	
PAD	1.84E-13	3.384781	0.0010	H1 diterima
DAU	5.61E-13	5.074754	0.0000	H2 diterima
BM	-3.26E-15	-0.075129	0.9402	H3 ditolak
TA	-0.012234	-3.437001	0.0008	H4 diterima
IDI	0.068029	5.471160	0.0000	H5 diterima

Sumber : Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel diatas, maka persamaan regresi linier berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\gamma = 63.34791 + 1.84 \times 10^{-13}PAD + 5.61 \times 10^{-13}DAU - 3.26 \times 10^{-15}BM - 0.012234TA + 0.068029IDI + e$$

Nilai konstanta pada regresi tersebut sebesar 63.34791, artinya bahwa jika variabel PAD, DAU, Belanja Modal, Temuan Audit, dan Indeks Demokrasi Indonesia diasumsikan *ceteris paribus* (variabel independen dianggap konstan atau nol), maka nilai IPM adalah sebesar 63.34791. Pengujian parsial dilakukan untuk mendeteksi apakah variabel independen secara individu memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis pertama sampai kelima dalam penelitian ini menggunakan uji-t.

Hasil pengujian variabel PAD terhadap kinerja pemerintah daerah menghasilkan output regresi dengan nilai t-statistik sebesar 3.384781 dengan nilai probabilitas  $0.0010 < 0.05$ . hasil pengujian ini membuktikan bahwa H1 diterima atau terdapat pengaruh signifikan dalam hubungan kausal tersebut. Nilai koefisien elastisitas model variabel PAD sebesar  $1.84 \times 10^{-13}$ , menunjukkan bahwa setiap kenaikan PAD sebesar 1 satuan, maka IPM akan naik sebesar  $1.84 \times 10^{-13}$  dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia selama periode penelitian, dengan demikian H1 didukung dalam penelitian ini.

Hasil pengujian variabel DAU terhadap kinerja pemerintah daerah menghasilkan output

regresi dengan nilai t-statistik sebesar 5.074754 dengan nilai probabilitas  $0.0000 < 0.05$ . hasil pengujian ini membuktikan bahwa H2 diterima atau terdapat pengaruh signifikan dalam hubungan kausal tersebut. Nilai koefisien elastisitas model variabel DAU sebesar  $5.61 \times 10^{-13}$  menunjukkan bahwa setiap kenaikan DAU sebesar 1 satuan, maka IPM akan naik sebesar  $5.61 \times 10^{-13}$  dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. DAU berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia selama periode penelitian, dengan demikian H2 didukung dalam penelitian ini.

Hasil pengujian variabel BM terhadap kinerja pemerintah daerah menghasilkan output regresi dengan nilai t-statistik sebesar -0.075129 dengan nilai probabilitas  $0.9402 > 0.05$ . hasil pengujian ini membuktikan bahwa Ho diterima atau tidak terdapat pengaruh signifikan dalam hubungan kausal tersebut. Nilai koefisien elastisitas model variabel BM sebesar  $-3.26 \times 10^{-15}$  menunjukkan bahwa setiap kenaikan BM sebesar 1 satuan, maka IPM akan turun sebesar  $3.26 \times 10^{-15}$  dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. BM tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia selama periode penelitian, dengan demikian H3 tidak didukung dalam penelitian ini.

Hasil pengujian variabel TA terhadap kinerja pemerintah daerah menghasilkan output regresi dengan nilai t-statistik sebesar -3.437001 dengan nilai probabilitas  $0.0008 < 0.05$ . hasil pengujian ini membuktikan bahwa H4 diterima atau terdapat pengaruh signifikan

dalam hubungan kausal tersebut. Nilai koefisien elastisitas model variabel TA sebesar -0.012234 menunjukkan bahwa setiap kenaikan TA sebesar 1 satuan, maka IPM akan turun sebesar 0.012234 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. TA berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia selama periode penelitian, dengan demikian H4 didukung dalam penelitian ini.

Hasil pengujian variabel IDI terhadap kinerja pemerintah daerah menghasilkan output regresi dengan nilai t-statistik sebesar 5.471160 dengan nilai probabilitas  $0.0000 < 0.05$ . hasil

pengujian ini membuktikan bahwa H5 diterima atau terdapat pengaruh signifikan dalam hubungan kausal tersebut. Nilai koefisien elastisitas model variabel IDI sebesar 0.068029 menunjukkan bahwa setiap kenaikan IDI sebesar 1 satuan, maka IPM akan naik sebesar 0.068029 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. IDI berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia selama periode penelitian. Dengan demikian H5 didukung dalam penelitian ini.

Hasil pengujian simultan model regresi, sebagai berikut :

**Tabel 7 Hasil Pengujian Simultan**

R-squared	0.982415	Mean dependent var	69.16713
Adjusted R-squared	0.977216	S.D. dependent var	4.397280
S.E. of regression	0.663744	Akaike info criterion	2.219123
Sum squared resid	50.66394	Schwarz criterion	2.921604
Log likelihood	-131.4342	Hannan-Quinn criter.	2.504519
F-statistic	188.9598	Durbin-Watson stat	1.785296
Prob(F-statistic)	0.000000	H6 diterima	

Sumber : Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel perhitungan statistik diatas, nilai Prob(F-statistic) sebesar  $0.0000 < 0.05$ . dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H6 diterima yang berarti variabel PAD, DAU, BM, TA, dan IDI secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia pada periode penelitian.

Uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) mendeteksi seberapa besar perubahan yang terjadi pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh perubahan variabel independennya. R squared dalam penelitian ini sebesar 0.982415 (98,24%), yang artinya bahwa PAD, DAU, BM, TA, dan IDI mampu menjelaskan variabel Kinerja Pemda yang diprosikan dengan IPM sebesar 98,24%, sedangkan sisanya 1,76% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil analisis variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki t hitung sebesar 3.384781, dengan nilai prob  $0.0010 < 0.05$ , yang artinya bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dengan demikian H<sub>1</sub> diterima. Hal ini disebabkan oleh, PAD merupakan salah satu sumber pendanaan yang digunakan pemerintah daerah dalam

membayai pembangunan daerah yang berimplikasi kepada masyarakat. Hal ini berarti suatu kewajiban bagi pemerintah daerah untuk mengimplementasikan jumlah PAD yang dimiliki terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi PAD yang diperoleh suatu daerah, maka semakin baik pula kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian (Wathani, 2017), (Renas, 2014), dan (Indrarti, 2011) menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang positif antara pendapatan asli daerah dan kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis DAU memiliki t hitung sebesar 5.074754 dengan nilai prob  $0.0000 < 0.05$ , yang artinya bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dengan demikian H<sub>2</sub> diterima. Hal ini berarti semakin besar Dana Alokasi Umum yang dialokasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka semakin tinggi pula kinerja yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut. (Indrarti, 2011) menyatakan salah satu fenomena *flypaper effects* menyiratkan bahwa daerah yang lebih bergantung pada DAU daripada

PAD merupakan daerah yang mampu mengelola kekayaan sumber dayanya secara lebih efisien dan ekonomis, namun juga memiliki tingkat kemandirian lebih rendah karena ketergantungannya pada dana transfer dari pusat. Peningkatan alokasi transfer juga cenderung diikuti oleh pertumbuhan belanja yang tinggi. Kinerja pemerintah daerah yang baik adalah bagaimana menggunakan DAU secara efisien untuk dapat menggali PAD yang lebih besar. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Indararti, 2011), (Sumarjo, 2010), dan (Virgasari, 2009) menjelaskan bahwa terdapat korelasi yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis Belanja Modal memiliki  $t$  hitung  $-0.075129$  dengan nilai prob  $0.9402 > 0.05$ , yang artinya belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dengan demikian  $H_0$  diterima dan  $H_3$  ditolak. Hal ini berarti tinggi dan rendahnya belanja modal yang digunakan tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Setyowati, 2012), (Mirza, 2012), (Sari et al., 2014) menjelaskan bahwa belanja modal memberi dampak positif pada indeks pembangunan manusia, sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis Temuan audit memiliki  $t$  hitung  $-3.437001$ , dengan nilai prob  $0.00008 < 0.05$ , yang artinya temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dengan demikian  $H_4$  diterima. Hal ini berarti semakin tinggi temuan audit yang ditemukan BPK semakin rendahnya kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (Mustikarini, 2012) menyatakan bahwa semakin banyak temuan audit menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dari Pemda tersebut, yang merupakan salah satu komponen yang dinilai dalam EKPPD, kurang baik yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kinerja dari Pemda tersebut. Oleh sebab itu Pemda harus lebih berhati-hati dalam pengelolaan keuangan negara karena hal ini tidak hanya berkaitan dengan masalah secara

akuntansi saja, tetapi juga berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Liestiani, 2008), (Mustikarini, 2012), dan (Ratnasari, 2016) yang menghasilkan temuan audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis Indeks Demokrasi Indonesia memiliki  $t$  hitung  $5.471150$ , dengan nilai prob  $0.000 < 0.05$  yang berarti bahwa Indeks Demokrasi Indonesia berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dengan demikian  $H_5$  diterima. Hal ini berarti semakin tinggi nilai Indeks Demokrasi Indonesia, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. IDI merupakan tantangan yang terus harus ditingkatkan oleh pemerintah daerah, serta diperlukannya sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan demokrasi yang lebih baik di Indonesia. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian (Ballester, 2010) yang melakukan analisis terhadap dampak pemilu di Filipina menjelaskan bahwa pemilu atau demokrasi berdampak positif pada sektor industri.

## 5. KESIMPULAN

Belanja Modal, Temuan Audit, dan Indeks Demokrasi Indonesia terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia selama rentang waktu 2014-2018. Hasil pengujian empiris yang dilakukan memberikan kesimpulan bahwa PAD, DAU, TA, dan IDI merupakan peranan penting dalam mempengaruhi kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sedangkan Belanja Modal tidak signifikan mempengaruhi kinerja pemerintah daerah di Indonesia selama periode penelitian.

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Indeks Demokrasi Indonesia berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada periode penelitian dengan kondisi ceteris paribus. Hal ini dapat dilihat dari nilai prob yang lebih kecil dari  $0.05$ . Temuan Audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah,

sedangkan Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Secara bersama-sama Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Temuan Audit, dan Indeks Demokrasi Indonesia memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia dengan nilai prob-f < 0.05.

Penelitian tentang determinan kinerja pemerintah daerah di Indonesia memiliki cakupan variabel yang luas sehingga memunculkan beberapa keterbatasan dalam beberapa hal. Hal ini memerlukan perluasan dan pengembangan bagi penelitian selanjutnya dalam rangka mengisi keterbatasan tersebut. Keterbatasan pertama, pemerintah daerah yang dijadikan sampel adalah hanya provinsi, diharapkan penelitian selanjutnya mengambil keseluruhan kab/kota di pemerintah daerah Indonesia. Keterbatasan selanjutnya, rentang waktu penelitian hanya lima periode, yaitu 2014-2018. Pengujian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah setidaknya membutuhkan periode penelitian yang cukup panjang.

## 6. REFERENSI

- Akbar, B. dan A. D. (2015). Audit Keuangan dan Kesejahteraan Rakyat Studi Pada Kabupaten Badung, Tabanan dan Kota Denpasar Tahun 2013. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara.*, 1(1).
- Ayu, I., & Yunita, C. (2016). *Modal Pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Bali*,
- Bagindo, H. et al. (2019). *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2019* (B. P. Statistik (ed.)).
- Ballester, et al. (2010). *A Study on the Impact of Election Spending on the Philippine Economy* (N. E. D. A. (NEDA) (ed.); Issue April).
- BPS. (2019). *Indeks Kemiskinan Multidimensi: Memotret Wajah-Wajah Kemiskinan Di Indonesia*.
- Indrarti, N. M. O. (2011). Hubungan Antara Opini Audit Pada Laporan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Riau*.
- Kusumawardani, M. (2012). Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*.
- Liestiani. (2008). Pengungkapan Laporan Keuangan Pemda Kabupaten/Kota di Indonesia Untuk Tahun Anggaran 2006. *Skripsi, Universitas Indonesia*.
- Mangkunegara, I. (2015). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Kota dan Kabupaten di Sumatera Utara. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 1(2), 145.
- Mirza, D. S. (2012). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. *Economics Development Analysis Journal.*, 1(1).
- Muid, D. (2014). *Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2009-2011 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Jl . Prof . Soedarto SH Tembalang , Semarang 50239 , Phone + 622476486851* Keywords : *Characteristics Local Government , Audit Findings ,, Local Government.* 4, 1–15.
- Mustikarini, W. A. dan D. F. (2012). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotadi Indonesia Tahun Anggaran 2007. *Banjarmasin: Simposium Nasional Akuntansi XV*.
- Nugroho, R. A. (2014). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Skripsi. Universitas Diponegoro*.
- Prasetyaningsih, E. (2015). Pengaruh Karakteristik Keuangan Daerah Dan Temuan Audit Terhadap Kinerja Pemerintah Pada Pemerintah Daerah Se-Indonesia. *Thesis. Surakarta : Universitas Sebelas Maret*.
- Ramadhani, S. D. C. U. (2019). Pengaruh

- Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Dan Dana Abntuan Pemerintah Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. *Majalah Ilmiah Solusi.*, 17(1).
- Ratnasari, A. Y. U. D. (2016). *Daerah Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( Studi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Periode 2012-2014 )*. 1–25.
- Renas, D. M. (2014). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting. Vol.3. No.3*.
- Sari, G. N., Kindangen, P., Rotinsulu, T. O., & Ratulangi, U. S. (2014). *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan Di Sulawesi Utara Tahun 2004 – 2014*.
- Setyowati, L. dan Y. K. S. (2012). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening*. 9(1).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Sumarjo, H. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daeah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Universitas Sebelas Maret Surakarta*.
- Virgasari, A. (2009). Hubungan Antara Opini Auditor pada Laporan Keuangan Daerah, PAD dan DAU dengan Kinerja Keuangan Daerah. *Skripsi. Universitas Brawijaya Malang*.
- Wathani, H. I. (2017). Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah, Karakteristik Pemerintah Daerah dan Opini Audit terhadap Kinerja Pemerintah Daerah serta Implikasinya Terhadap IPM di NTB. *Mataram: Universitas Mataram*.
- Yanto, E., & Fattah, V. (2004). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah ( Pad ) Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia ( Ipm ) ( Survei Pada Kabupaten / Kota Di Sulawesi Tengah )*. 125–135.